

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SLEMAN

Novia Dhiniharitsa

D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

16212044@students.uii.ac.id

ABSTRACT

Good governance can begin with government financial management. Good financial management will help national growth and public welfare. The way to manage government finances through the public budget planning. In Indonesia public budget plan is distinguished between center and regions. The purpose of the regional budget allocation is to increase the effectiveness and efficiency of the regional economy. The regional financial budget is used for government matters and government organizations, then control over the management of regional budget is given to the parties concerned. To determine the performance of the organization can be done through the assessment of the effectiveness and efficiency of the budget. Therefore the research was conducted to determine the effectiveness and efficiency of public budget in Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman with the budget period 2016-2018.

Keywords : *Good Governance, Public Budget Planning, Effectiveness, Efficiency*

PENDAHULUAN

Pemerintah, perusahaan maupun organisasi berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Penyusunan rencana sebagai arahan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerjanya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan

(Julita, 2011). Strategi yang dilakukan salah satu contohnya adalah dibuatnya rencana jangka pendek atau yang biasa disebut sebagai anggaran. Anggaran dibuat cukup terinci guna memungkinkan disusunnya laporan keuangan bagi entitas tersebut untuk suatu periode di masa depan (akhir periode anggaran) (Carter, 2009). Anggaran berperan penting dalam sebuah organisasi. Perencanaan keuangan

secara rinci disusun untuk membantu tercapainya program kegiatan organisasi. Berbagai macam permintaan masyarakat terhadap organisasi publik, salah satunya keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan publik, sehingga setiap organisasi pemerintah senantiasa menjadikan lebih baik kinerjanya supaya tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai (Tamasoleng, 2015).

Realitanya *good governance* masih menghadapi banyak kendala dalam masyarakat dikarenakan opini mengenai tata kelola pemerintahan dipandang masih kurang, banyaknya berita serta isu-isu mengenai KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka dari itu, dengan diterapkannya tata kelola pemerintahan yang memiliki prosedur yang jelas diharapkan kualitas pemerintah akan semakin baik. Indikator kualitas pemerintahan yang baik yaitu pelayanan publiknya baik, angka korupsi berkurang, dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan masyarakatnya serta realisasi anggaran tercapai (Dwiyanto, 2005).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dikepalai oleh Kepala Badan yang memiliki kedudukan dibawah dan pertanggungjawabannya

kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Kegiatan operasional Badan Kesbangpol dijalankan menggunakan sumber dana yang diperoleh dari dana APBD Kabupaten Sleman yang dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan penggunaan semua dana diserahkan sepenuhnya kepada instansi tersebut sesuai dengan dana yang ada dan dipertanggungjawabkan melalui laporan realisasi anggaran. Upaya pencegahan penyalahgunaan dana anggaran seperti menggunakan dana anggaran untuk kebutuhan pribadi, maka diperlukanlah pengendalian keuangan yang baik. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Badan Kesbangpol dalam pengelolaan keuangannya harus *akuntable* dan transparan atas laporan keuangannya, sehingga program yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan sah. Berdasarkan uraian diatas rencana anggaran dan realisasinya memegang peran penting dalam pertanggungjawaban sebuah organisasi dalam mengelola keuangannya. Latar belakang tersebut penulis menganalisa efektifitas dan efisiensi rencana anggaran belanja dengan mengambil judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.”

Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi dan memahami rencana anggaran belanja dan laporan realisasi anggaran badan terkait serta menganalisa efektivitas dan efisiensi rencana anggaran belanja langsung.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis data perhitungan dalam pengukuran efektivitas dan efisiensi anggaran belanja. Penulis memperoleh data dari pemilik data (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman) kemudian melakukan perhitungan efektivitas dan efisiensi. Kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target dan Realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman dalam jangka waktu 3 tahun terakhir (2016-2018) :

Tabel 3.1 Anggaran Belanja Tidak Langsung

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
2016	1.187.457.150	1.140.130.181
2017	2.232.900.000	1.851.133.772
2018	2.068.446.607	1.910.745.965

METODE PENELITIAN

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Langsung

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
2016	2.495.523.400	2.238.037.763
2017	2.392.602.200	2.141.303.053
2018	5.285.809.500	4.527.984.006

Pengukuran Efektivitas Anggaran

Mahsun (2009) mendefinisikan efektivitas sebagai gambaran mengenai kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah dianggarkan. Tingkat efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

$$\frac{\text{Realisasi belanja langsung}}{\text{Target belanja langsung}} \times 100\%$$

Kemudian persentase hasil tersebut dikategorikan kedalam beberapa tingkatan efektivitas (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996) :

- a. Tingkat pencapaian diatas 100% : sangat efektif

- b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% : efektif
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efektif
- d. Tingkat pencapaian 60% - 80% : kurang efektif
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60% : tidak efektif

Perhitungan menggunakan rumus diatas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, maka dapat dikategorikan anggaran belanja tidak efektif. Rincian dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

No.	Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Target Belanja Langsung	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1.	2016	2.238.037.763	2.495.523.400	89,68	Cukup Efektif
2.	2017	2.141.303.053	2.392.602.200	89,49	Cukup Efektif
3.	2018	4.527.984.006	5.285.809.500	85,66	Cukup Efektif

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman (Data Olahan)

Pengukuran Efisiensi Anggaran

Implementasi pengukuran efisiensi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan. Rumus menghitung tingkat efisiensi menurut Mahsun (2009) :

$$\frac{\text{Realisasi belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan :

- a. Tingkat pencapaian diatas 100% : tidak efisien
- b. Tingkat pencapaian 90% - 100% : kurang efisien
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efisien
- d. Tingkat pencapaian 60% - 80% : efisien
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60% : sangat efisien

Perhitungan menggunakan rumus diatas dalam kurun waktu 3 tahun terkahir pada Badan Kessatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, maka dapat dikategorikan anggaran belanja belum efisien. Rincian dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

No.	Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1.	2016	2.238.037.764	3.378.167.944	66,25	Efisien
2.	2017	2.141.303.053	3.992.436.825	53,63	Sangat Efisien
3.	2018	4.527.984.006	6.438.729.971	70,32	Efisien

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman (Data Olahan)

Pembahasan

A. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman

Kondisi efektivitas anggaran belanja pada suatu organisasi tidak selamanya mengalami peningkatan, sewaktu-waktu mengalami penurunan. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari apakah suatu program telah tercapai dari rencana yang ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan akibat dari keluaran (*output*) yaitu dalam pencapaian atau terlaksananya suatu program. Semakin besar *output* yang dihasilkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman tingkat efektivitas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir cukup efektif. Berdasarkan tabel 3.3 dapat dianalisis bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2016-2018), anggaran belanja langsung berbanding target anggaran belanja langsung hasilnya cukup efektif. Tahun 2016 tingkat efektivitasnya mencapai 89,68%. Kemudian pada tahun 2017 89,49%. Pada tahun 2018 menurun menjadi 85,66%. Berdasarkan data diatas Badan Kesbangpol sudah cukup baik dalam menggunakan dana, sehingga program dapat tercapai. Supaya tingkat anggaran belanja menjadi efektif, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antar

bidang-bidang yang bersangkutan dalam rangka pencapaian suatu program. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran belanja, supaya target atau rencana anggaran program yang akan digunakan dapat direalisasikan dengan maksimal.

B. Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman

Pengukuran tingkat efisiensi suatu organisasi melalui rasio antara pemasukan dan pengeluaran. Seberapa baik organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu keluaran. Pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi manajerial. Efisiensi alokasi merupakan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas normal. Sedangkan efisiensi manajerial atau teknis merupakan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Analisis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, tingkat efisiensi dari anggaran belanja sudah efisien. Berdasarkan tabel 3.4 mengenai perbandingan tingkat efisiensi dalam kurun waktu 3 tahun (2016-2018) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman

dapat dianalisis bahwa, selama kurun waktu 3 tahun, realisasi anggaran belanja langsung dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja hasilnya efisien. Pada tahun 2016, tingkat efisiensinya mencapai 66,25%. Tahun 2017 53,63% yang artinya sangat efisien, kemudian pada tahun 2018 mencapai 70,32%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kemampuan badan dalam mengalokasikan dana anggaran untuk belanja program sudah baik. Alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanakan atau diwujudkan dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait, khususnya dengan Bappeda, DPKAD, dan Inspektorat Kabupaten Sleman dalam rangka penyusunan anggaran belanja, kemudian kepemimpinan dan pengendalian internal yang baik, komitmen, profesionalitas, kejujuran yang baik dari karyawan, serta adanya aturan teknis dan SOP dalam Badan Kesbangpol.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus menurut Mahsun (2009), maka dapat disimpulkan kondisi anggaran belanja dengan capaian kinerja pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

- Tahun 2016 = 89,68%
- Tahun 2017 = 89,49%
- Tahun 2018 = 85,66%.

Periode anggaran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2016-2018) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung hasil dari analisisnya secara keseluruhan cukup efektif. Program yang direncanakan telah direalisasikan dengan cukup baik.

Sedangkan tingkat efisiensi anggaran belanja langsung dalam kurun waktu 3 tahun antara 2016-2018 hasilnya efisien, keseluruhan realisasi anggaran belanja langsung setelah dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tingkatan efisien, telah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2016 = 66,25%
- Tahun 2017 = 53,63%
- Tahun 2018 = 70,32%.

Berdasarkan definisi efektifitas dan efisiensi, Badan Kesbangpol telah merealisasikan definisi tersebut, yaitu dengan input dana anggaran yang dialokasikan kedalam program-program. Kemudian outputnya adalah tercapai atau terlaksananya program-program tersebut.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan lagi koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan badan, termasuk pemerintah daerah hingga masyarakat dalam melaksanakan berbagai program kegiatan, sehingga program dapat terlaksana dengan alokasi dana yang optimal.
2. Peningkatan tenaga ahli pada subbagian keuangan melalui pelatihan keahlian akuntansi dan pelatihan karyawan dalam menggunakan teknologi, sehingga dalam penyusunan maupun pertanggungjawaban laporan keuangan memang melalui orang-orang yang berkompeten.
3. Pelayanan kepada masyarakat senantiasa ditingkatkan. Sehingga program-program yang bersangkutan dengan masyarakat dapat terlaksana secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter, W. K. (2009). *Akuntansi Biaya : Cost Accounting, Buku 2, Edisi 14*. Salemba Empat.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, K. (2004). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004*. Jakarta.
- Julita. (2011). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, vol. 10, hlm. 1-9.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kemendagri, D. J. *Kamus Keuangan Daerah Kemendagri*. Dipetik Mei Jumat, 2019, dari Kamus Keuangan Daerah Kemendagri: http://keuda.kemendagri.go.id/kamuskeuda/sort_by/L
- Mohamad, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mihaiu, O. C. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of The Public Sector. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, vol. 4, hlm. 1-16.

Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Noordiawan, H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Salamun, S. (2007). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Menurut PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006) Diedit oleh Abdul Halim dalam Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sleman, B. K. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman*. Dipetik Mei Sabtu, 2019, dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman: https://kesbangpol.slemankab.go.id/?page_id=3043

Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sam Ratulangi. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, vol. 3, hlm. 1-14.